

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Administrasi Jakarta Timur merujuk pada sebuah wilayah administratif yang terletak di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis, kawasan ini terbentang di antara koordinat 106°49'35'' Bujur Timur dan 06°10'37'' Lintang Selatan. Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki luas wilayah sebesar 188,03 km². Luas tersebut mencakup kurang lebih 28,39% dari total wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur memegang predikat sebagai entitas terbesar di dalam lingkup DKI Jakarta [1].

Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari sepuluh kecamatan yaitu, Kecamatan Pasar Rebo dengan luas wilayah 12,98 km², Kecamatan Ciracas seluas 16,08 km², Kecamatan Cipayung mencapai 28,45 km², Kecamatan Makassar dengan luas wilayah 21,85 km², Kecamatan Kramatjati yang mencakup 13,00 km², Kecamatan Jatinegara dengan luas 10,25 km², Kecamatan Duren Sawit seluas 22,65 km², Kecamatan Cakung yang memiliki luas sebesar 42,28 km², Kecamatan Pulogadung dengan luas wilayah 61 km², dan Kecamatan Matraman yang mencakup luas area 4,88 km². Total keseluruhan, kota Administrasi Jakarta Timur secara Administratif membawahi 65 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayahnya.

Kejadian kebakaran di Kecamatan Cakung pada tahun 2021 tercatat sebanyak 63 kasus kebakaran dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 67 kasus kebakaran. Data menunjukkan bahwa Kecamatan Cakung menjadi wilayah dengan tingkat kejadian kebakaran tertinggi dalam selama periode tahun 2021 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Kecamatan Cakung tercatat sebesar 13 orang per km².

Insiden kebakaran di wilayah perkotaan dapat dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kurang optimalnya instalasi, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, serta aktivitas manusia yang dapat dilakukan baik

secara disengaja maupun tidak sengaja. Salah satu faktor yang seringkali menjadi penyebab kebakaran di daerah pemukiman adalah kelalaian manusia [2].

Berdasarkan data kebakaran yang dimiliki oleh Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Timur, Kelurahan Pulo Gebang menjadi kelurahan yang mengalami kejadian bencana kebakaran terbanyak di Kecamatan Cakung dengan 13 kasus kebakaran pada tahun 2020, 15 kasus kebakaran pada tahun 2021, dan 21 kasus kebakaran pada tahun 2022. Kondisi ini menimbulkan perhatian serius terhadap upaya pencegahan kebakaran di wilayah tersebut. Beberapa faktor penyebab kebakaran yang sering diidentifikasi di Kelurahan Pulo Gebang meliputi kegagalan sistem listrik, penggunaan kompor atau gas yang kurang terawat, kebiasaan membakar sampah tanpa pengawasan, dan beragam penyebab lainnya.

Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi di Kelurahan Pulo Gebang dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan terlebih khusus tentang faktor penyebab kebakaran sering terjadi di Kelurahan Pulo Gebang. Penyebab kebakaran dapat bervariasi, banyak di antaranya bersumber dari perilaku masyarakat yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kebakaran. Selain itu, terdapat banyak faktor lain yang turut berkontribusi pada terjadinya kebakaran.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan personel dinas pemadam kebakaran, ditemukan bahwa masyarakat yang sedang panik saat terjadinya kebakaran dapat menjadi penghambat bagi petugas dalam melaksanakan proses pemadaman kebakaran, dikarenakan kondisi masyarakat yang panik ketika rumah milik mereka hampir terbakar akibat api yang menjalar. Warga yang panik dikarenakan penjaran api menuju ke rumah mereka memaksa pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang sedang menjalar ke rumah mereka sehingga pemadaman pusat api kebakaran menjadi terhambat. Tidak hanya itu, masyarakat juga ada yang memaksa untuk memadamkan api sendiri menggunakan alat pemadam api milik pemadam kebakaran. Dikarenakan sikap masyarakat yang tidak kooperatif maka proses pemadaman menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Beberapa masyarakat juga tidak memahami bagaimana proses peringatan kebakaran kepada pemadam kebakaran, masyarakat masih berfikir

bahwa jika memanggil petugas pemadam kebakaran maka akan dipungut biaya, sehingga pemberitahuan kejadian kebakaran dari masyarakat kepada pemadam kebakaran menjadi lebih lama. Dikarenakan hal tersebut, proses pemadaman kebakaran menjadi telat untuk datang.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007, penanggulangan bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya atau kegiatan yang dilaksanakan yang mencakup tahapan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan yang dilakukan secara berkesinambungan baik sebelum, selama, maupun setelah terjadinya bencana [3].

Berdasarkan NFPA 1620 edisi 2003, *Pre-Fire Planning* atau *Pre-Incident Planning* adalah sebuah dokumen yang dikembangkan dengan cara mengumpulkan data tanggap darurat dan bersifat rinci [4]. Data tersebut digunakan oleh tim tanggap darurat dalam menentukan sumber daya dan tindakan yang akan diperlukan dalam memitigasi keadaan darurat di suatu fasilitas.

Penerapan *Pre-Fire Planning* di lingkungan masyarakat bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja yang dapat menjadi sumber kebakaran [5], selain itu *Pre-Fire Planning* juga dapat memaksimalkan proses tanggap darurat dan proses evakuasi dikarenakan adanya pelatihan dan pembagian tugas terkait proses tanggap darurat kepada masyarakat [6]. Penerapan *Pre-Fire Planning* di lingkungan masyarakat diharapkan dapat berdampak dalam proses penanggulangan bencana khususnya bencana kebakaran [7]. Dengan adanya *Pre-Fire Planning* diharapkan masyarakat lebih waspada kepada hal – hal yang dapat menjadi sumber kebakaran dan memberikan intruksi mengenai apa yang harus dilakukan saat terjadinya keadaan darurat akibat kebakaran.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain :

- 1) Mengapa *Pre-Fire Planning* menjadi suatu hal yang penting dalam penanggulangan bencana kebakaran?
- 2) Apa saja hal – hal yang dapat menjadi sumber terjadinya kebakaran?

- 3) Bagaimana upaya pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat?
- 4) Bagaimana upaya penanggulangan kebakaran di lingkungan masyarakat?
- 5) Apakah pihak dinas pemadam kebakaran melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai langkah-langkah mitigasi serta prosedur operasional dalam menghadapi keadaan darurat?
- 6) Apakah sudah terdapat titik kumpul jika terjadi bencana kebakaran?
- 7) Apakah sudah terdapat peta jalur evakuasi untuk keadaan darurat?
- 8) Bagaimana strategi pemberitahuan dini kebakaran yang terdapat di masyarakat?
- 9) Apakah sudah terdapat alur evakuasi untuk keadaan darurat?
- 10) Apakah ada masyarakat yang pernah mendapatkan pendidikan yang lebih lanjut mengenai kebakaran?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk memberikan arah pembahasan yang lebih spesifik dan selaras dengan tujuan penulisan. Adapun ruang lingkup permasalahan dalam tugas akhir ini mencakup hal-hal berikut :

1. Penelitian ini akan membahas tentang perancangan *Pre-Fire Planning* di RT.01/RW.05 Kelurahan Pulo Gebang.
2. Penelitian ini akan menentukan *Pre-Fire Planning* di RT.01/RW..05 Kelurahan Pulo Gebang.
3. Penelitian ini akan berfokus kepada identifikasi sumber kebakaran dan pemberian tugas kepada masyarakat dalam menangani suatu kejadian kebakaran di RT.01/RW.05 Kelurahan Pulo Gebang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apa saja sumber bahaya dan tingkat risiko kebakaran yang terdapat di kawasan pemukiman padat penduduk RT.01/RW.05 di Kelurahan Pulo Gebang?

2. Bagaimana penyusunan rencana tanggap darurat kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk RT.01/RW.05 di Kelurahan Pulo Gebang?
3. Bagaimana cara menentukan tim tanggap darurat kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk RT.01/RW.05 di Kelurahan Pulo Gebang?
4. Bagaimana perencanaan evakuasi warga di kawasan pemukiman padat penduduk RT.01/RW.05 di Kelurahan Pulo Gebang?

1.5. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bahaya dan tingkat risiko kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk RT.01/RW.05 di Kelurahan Pulo Gebang.
2. Menyusun rencana tanggap darurat kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk RT.01/RW.05 di Kelurahan Pulo Gebang.
3. Membentuk tim tanggap darurat kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk RT.01/RW.05 di Kelurahan Pulo Gebang.
4. Membuat rencana evakuasi warga di kawasan pemukiman padat penduduk RT.01/RW.05 di Kelurahan Pulo Gebang.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat bagi Mahasiswa

Berperan sebagai sarana edukasi dalam meningkatkan literasi dan wawasan terkait prosedur mitigasi kebakaran pada area hunian padat penduduk di wilayah perkotaan.

1.6.2. Manfaat bagi Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi program studi sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi dan gambaran mengenai penerapan *Pre-Fire Planning* di pemukiman padat penduduk.

2. Hasil penelitian ini dapat difungsikan sebagai rujukan akademis bagi seluruh sivitas akademika Program Studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran Universitas Negeri Jakarta guna memperdalam pemahaman terkait penerapan *Pre-Fire Planning* di pemukiman padat penduduk.



Intelligentia - Dignitas